



**ANALISIS INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN UPAH TERHADAP PENGANGGURAN
TERDIDIK DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2009-2013**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh :

Rizka Febiana Putri

7111411044

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 15 April 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan




Karolina Br. Sebayang, S.E, M.Si
NIP. 198007172008012016

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Sucihatiningsih D. W. P., M.Si
NIP. 196812091997022001

PENGESAHAN KELULUSAN

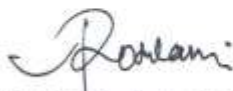
Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2015

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3



Prof. Dr. Rusdarti, M.Si

NIP. 195904211984032001



Diky Aji Suseno, S.E. M.Si

NIP. 197612032003121004



Prof. Dr. Sucihatiningsih D.W.P. M.Si

NIP. 196812091997022001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Wahyono, M.M

NIP. 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, *28* April 2015



Rizka Febiana Putri

7111411044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap (QS. Al Inshirah 94:6-8).

Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama manusia mau berusaha (Hyda).

PERSEMBAHAN

Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang saya sayangi, Ayahanda H. Pupung Arifin dan Ibunda Hj. Sri Wahyuningsih atas segala motivasi dan doanya yang tak pernah berhenti.
2. Adikku, Rhizal Rhizaldi Putra yang selalu memberikan dukungan.
3. Muhammad Rifqi Hidayat yang tak pernah berhenti memberikan motivasi dan dukungan.
4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa lepas dari dukungan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Lesta Karolina Br. Sebayang, S.E, M.Si. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
4. Prof. Dr. Sucihatiningsih D.W. P, M.Si. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasehat, pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Penguji pertama Prof. Dr. Rusdarti, M.Si dan Penguji kedua Deky Aji Suseno, S.E, M.Si yang telah memberikan pengarahan serta bimbingannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, atas bekal ilmu dan bimbingannya.

7. Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Instansi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku (jupe, dian, desi, anggi, onil) yang selalu ada dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan, motivasi dan semangat.
10. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2011, atas masukan serta motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman Kos Griya Savitri, yang telah memberikan dukungan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah karya yang sempurna karena memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, April 2015

Penulis

SARI

Putri, Rizka Febiana. 2015. *Analisis Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Prof. Dr. Sucihatiningsih D.W.P, M.Si.

Kata Kunci : Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Pengangguran Terdidik.

Provinsi Jawa Tengah selalu menjadi urutan ke-2 dengan jumlah pengangguran terbanyak se-Indonesia. Pengangguran saat ini lebih didominasi oleh angkatan kerja lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi, hal tersebut merupakan masalah serius karena berdampak pada merosotnya produktifitas sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap pengangguran terdidik serta upaya pemerintah dalam menangani masalah pengangguran terdidik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data panel yaitu kombinasi *time series* dan *cross section* yang diuji dengan metode analisis regresi *doubel log linier* dengan *Generalized Least Square (GLS)*. Pengujian secara parsial digunakan uji t-Statistik dan pengujian secara serempak digunakan uji F-statistik, dimana pengujian tersebut menggunakan alat bantu program Eviews 6.0. Selain itu metode yang digunakan adalah metode wawancara untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah pengangguran terdidik.

Hasil dari penelitian ini adalah inflasi berpengaruh positif dan signifikan yaitu sebesar 0.015718, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan yaitu sebesar -0.048000, upah berpengaruh negatif dan signifikan yaitu sebesar -1.488464, dan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah dengan probabilitas sebesar 0.000000. Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi perluasan, penempatan dan pelatihan tenaga kerja, selain itu melalui perbaikan infrastruktur untuk menarik minat investor.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah, dan upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah. Maka disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan yang dilakukan, selain itu diharapkan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja agar dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

ABSTRACT

Putri, Rizka Febiana. 2015. Analysis of Inflation, Economic Growth and Wages for the Educated Unemployment in Central Java Province Year 2009-2013. Thesis. Department of Economic Development, Faculty of Economics, University of Semarang. Supervisor : Prof. Dr. Sucihatiningsih D.W.P., M.Si.

Keywords: Inflation, Economic Growth, Wages, Unemployment Educated.

Central Java Province has always been the No-2 spot with the highest unemployment rate in Indonesia. Unemployment is currently dominated by labor force high school graduate/Vocational and Higher Education, it's a serious problem because it leads to decreasing productivity of human resources. The purpose of this study was to determine the effects of inflation, economic growth and wages for educated unemployment and the government's efforts in addressing the problem of educated unemployment.

The method used is quantitative method with panel data is a combination of time series and cross section were tested by double log linear regression analysis method with Generalized Least Square (GLS). Partial test used statistical t-test and test simultaneously used the F-statistic test, where such testing using tools Eviews 6.0 program. Other than that the methods used were interviews to determine the government's efforts in addressing the problem of educated unemployment.

The results of this study are significant positive effect of inflation is equal to 0.015718, economic growth and a significant negative effect in the amount of -0.048000, pay a significant negative effect in the amount of -1.488464, and variable inflation, economic growth, and wages together influential significantly to the educated unemployed in Central Java Province with a probability equal to 0.000000. Government efforts include the expansion, placement and training of manpower in addition through improved infrastructure to attract investors.

The conclusion of this study indicate that the inflation variable positive and significant effect on unemployment educated in Central Java, economic growth and a significant negative effect on unemployment educated in Central Java, and wage a significant negative effect on unemployment educated in Central Java. Then recommended to the government to pay more attention to policies that do, and are expected for the company to pay more attention to the welfare of workers in order to increase the productivity of labor.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SARI	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1. Tenaga Kerja.....	13

2.2. Pasar Tenaga Kerja.....	15
2.3. Pengangguran	19
2.4. Pengangguran Terdidik	21
2.5. Inflasi	23
2.6. Pertumbuhan Ekonomi	25
2.7. Upah	27
2.8. Hubungan Antara Variabel Dependent dan Independent	29
2.8.1. Hubungan Antara Inflasi dan Pengangguran Terdidik	29
2.8.2. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terdidik	31
2.8.3. Hubungan Antara Upah dan Pengangguran Terdidik	32
2.3. Penelitian Terdahulu	34
2.4. Kerangka Berfikir	38
2.5. Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis dan Sumber	41
3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	42
3.3. Metode Pengumpulan Data	43
3.4. Metode Analisis	44
3.4.1. Analisis <i>Polled Data</i>	44
3.4.2. Spesifikasi Model Regresi	49
3.4.3. Pengujian Statistik	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	53
4.1.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	53
4.2. Analisis Regresi.....	64
4.2.1. Uji Spesifikasi Model	64
4.2.2. Uji Statistik	66
4.3. Pembahasan	68
4.3.1. Analisis <i>Polled Data</i>	68
4.3.2. Upaya Pemerintah dalam Menangani Masalah Pengangguran Terdidik	74
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	5
Tabel 1.2 Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	9
Tabel 2.1 Perbedaan Pasar Tenaga Kerja Terdidik dan Pasar Tenaga Kerja Tidak Terdidik	19
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1 Jumlah Pengangguran Terdidik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	57
Tabel 4.2 Inflasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	59
Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	61
Tabel 4.4 Tingkat Upah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	63
Tabel 4.5 <i>Output</i> Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	64
Tabel 4.6 Uji t-Statistik	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka dan Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	4
Gambar 1.2 Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	6
Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	8
Gambar 2.1 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja	15
Gambar 2.2 <i>Excess Demand of Labor</i>	17
Gambar 2.3 <i>Excess Supply of Labor</i>	18
Gambar 2.4 Kurva Phillips Jangka Panjang	30
Gambar 2.5 Kurva Okun	32
Gambar 2.6 Pengangguran Tingkat Upah	34
Gambar 2.7 Kerangka Berfikir	38
Gambar 4.1 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 ..	55
Gambar 4.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 ..	56
Gambar 4.3 Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	58
Gambar 4.4 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	60
Gambar 4.5 Upah Minimum Regional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Jumlah Pengangguran Terdidik, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah	84
Lampiran 2 <i>Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratio</i>	89
Lampiran 3 <i>Correlated Random Effects-Hausman Test</i>	90
Lampiran 4 <i>Common Effects Model</i>	91
Lampiran 5 <i>Fixed Effects Model</i>	92
Lampiran 6 <i>Random Effects Model</i>	93
Lampiran 7 Pedoman Wawancara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	94
Lampiran 8 Pedoman Wawancara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	96
Lampiran 9 Surat Permohonan Ijin Penelitian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	98
Lampiran 10 Surat Permohonan Ijin Penelitian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	99
Lampiran 11 Surat Permohonan Ijin Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu negara mengalami peningkatan dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan penduduk, tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mampu menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan namun dilain pihak dihadapkan dengan berbagai masalah seperti pengangguran.

Menurut Astuti (2014:10) bahwa “Pengangguran adalah suatu masalah yang dihadapi semua negara di dunia sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja. Pengangguran selalu menjadi salah satu dari prioritas masalah yang harus dihadapi dalam setiap perencanaan pembangunan”.

Pengangguran merupakan suatu fenomena yang terjadi di semua negara, tak terkecuali di Negara Indonesia. Di Indonesia, pengangguran merupakan suatu permasalahan yang serius, karena menurut Suyuthi (1989:139) bahwa “Dilihat dari segi ekonomi pengangguran dapat merusak perekonomian, selain itu adanya pengangguran menyebabkan kemakmuran masyarakat menjadi berkurang”.

Badan Pusat Statistik (2014:xlix), “Indonesia mengalami peningkatan jumlah pengangguran dari bulan Februari 2013 sebesar 7.068.519 menjadi 7.170.523 pada bulan Mei 2013”. Hal tersebut disebabkan karena hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat namun tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Faktanya yang terjadi sekarang Indonesia lebih banyak menghasilkan pencari kerja dari pada pencipta kerja.

Meningkatnya jumlah pengangguran tidak hanya disebabkan oleh penurunan kesempatan kerja, namun juga akibat meningkatnya jumlah angkatan kerja. Lipsey (1992:09) menyimpulkan bahwa “Jumlah orang yang memasuki angkatan kerja sudah melebihi jumlah orang yang meninggalkan angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja mengandung makna bahwa pengangguran kadang kala bertambah meskipun pada saat yang sama kesempatan kerja juga bertambah”.

Masalah lain pada bidang ketenagakerjaan yaitu, penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dituntut oleh pasar tenaga kerja, meskipun permintaan sangat tinggi. Sukirno (2010:439) menyimpulkan bahwa “Pembangunan perekonomian memerlukan dua faktor penting yaitu modal dan tenaga ahli. Tersedianya modal saja tidak cukup untuk memoderenkan suatu perekonomian, pelaksana pemodern tersebut juga harus ada. Dengan kata lain, diperlukan berbagai golongan tenaga kerja terdidik”.

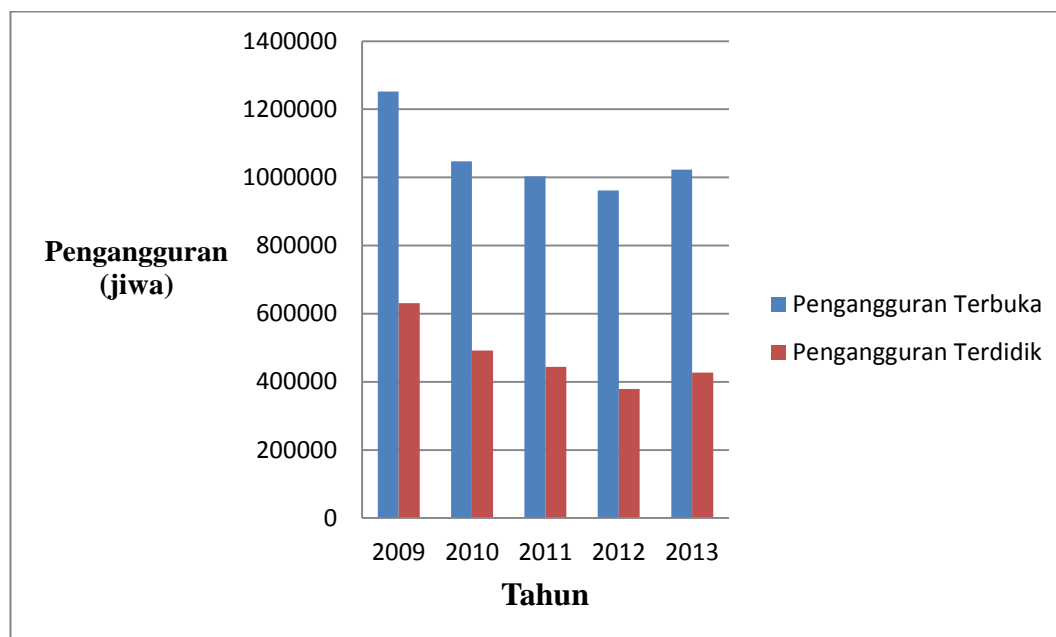
Nyatanya yang terjadi saat ini, pengangguran lebih didominasi oleh lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi (tenaga kerja terdidik) yang seharusnya tenaga kerja terdidik menjadi *human investment* bagi suatu negara.

Hal tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam melakukan perluasan kesempatan kerja dan kegagalan dalam menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi agar tenaga kerja terdidik dapat bersaing didunia kerja.

Dari sekian banyak wilayah di Indonesia yang memiliki permasalahan dibidang ketenagakerjaan, menurut Badan Pusat Statistik 2014 bahwa “Provinsi Jawa Tengah selalu menjadi urutan ke-2 se-Indonesia yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak dari tahun 2009-tahun 2013 sesudah Provinsi Jawa Barat”.

Salah satu penyebab pengangguran meningkat adalah bertambahnya jumlah pencari kerja yang pesat namun tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, jumlah pengangguran yang saat ini lebih di dominasi oleh lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi (tenaga kerja terdidik) menunjukkan kemerosotan produktivitas sumber daya manusia yang seharusnya sumber daya manusia harus dimanfaatkan dengan benar, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dalam proses pembangunan ekonomi, problematika ini sudah selayaknya memperoleh perhatian yang serius.

Pengangguran tenaga kerja terdidik merupakan bagian dari pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan lulusan SLTA/Kejuruan, Diploma, dan Sarjana yang belum/tidak memperoleh pekerjaan. Perbandingan jumlah pengangguran terbuka dengan pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), BPS (diolah)

Gambar 1.1.

Perbandingan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka dan Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka mengalami fluktuatif dari tahun 2009-tahun 2013. Meskipun pengangguran terbuka mengalami penurunan, hal tersebut tetap menjadi masalah bagi pemerintah daerah karena hampir 50% jumlah pengangguran yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah selalu didominasi oleh pencari kerja lulusan SLTA/Kejuruan, Diploma, dan Sarjana. Dimana pencari kerja lulusan SLTA/Kejuruan, Diploma dan Sarjana atau pendidikan menengah ke atas (tenaga kerja terdidik) yang belum/tidak mendapatkan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan adalah pengangguran terdidik. Sama halnya dengan pengangguran terbuka, presentase pengangguran pada pengangguran terdidik pada tahun 2009-tahun 2013 mengalami fluktuatif,

dimana pada tahun 2009-tahun 2012 mengalami penurunan namun pada tahun 2012-tahun 2013 mengalami kenaikan.

Perincian pengangguran terdidik menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

Tahun	Tingkat Pendidikan			Total (jiwa)
	SLTA/Kejuruan (jiwa)	D1/D2/D3 (jiwa)	D4/S1+ (jiwa)	
2009	493.637	60.539	77.164	631.340
2010	361.092	53.042	77.400	491.534
2011	342.375	27.925	73.763	444.063
2012	318.870	19.340	40.666	378.876
2013	376.632	14.171	36.658	427.461
Total	1.892.606	175.017	305.651	2.373.274

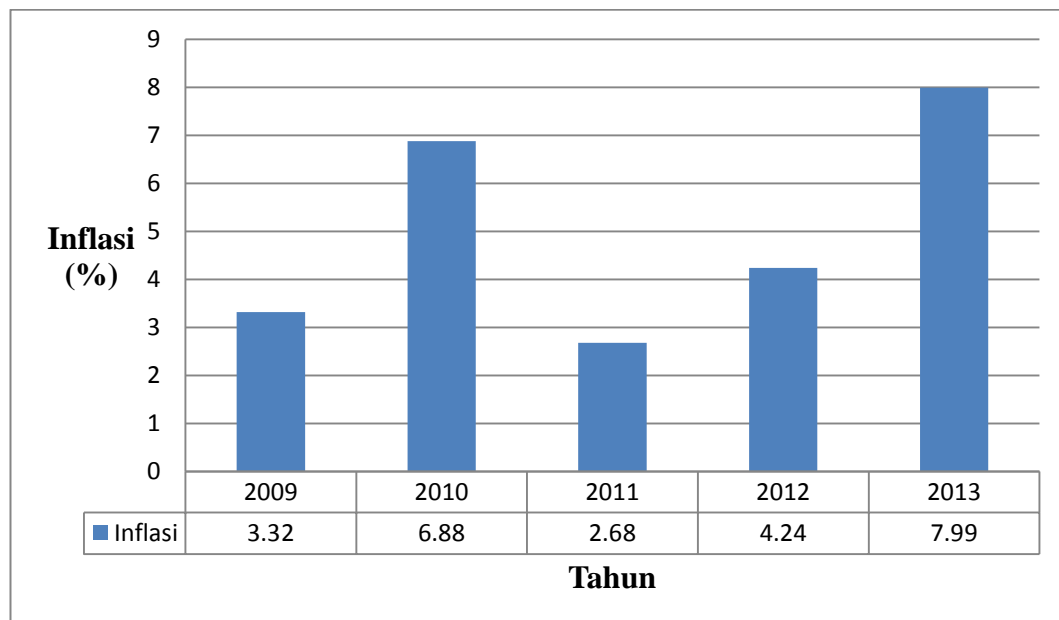
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), BPS

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terdidik menurut tingkat pendidikan dari tahun 2009-tahun 2013 lebih banyak didominasi oleh lulusan SLTA/Kejuruan sebesar 1.892.606 jiwa, lulusan D4/S1+ sebesar 305.651 jiwa, dan lulusan D1/D2/D3 sebesar 175.017 jiwa dari jumlah keseluruhan pengangguran terdidik sebesar 2.373.274 jiwa.

Salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran adalah menurunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun jelas menurunkan jumlah barang/jasa yang diproduksi oleh perusahaan, dengan keadaan seperti ini maka perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerja yang berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja sehingga pengangguran akan semakin meningkat.

Pengangguran yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat menyebabkan adanya hubungan dengan inflasi, karena inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, Sukirno (2008:152) menyimpulkan bahwa “Inflasi merupakan proses kenaikan pada harga-harga barang secara umum, maka tingginya tingkat inflasi akan berakibat pada peningkatan tingkat bunga pinjaman. Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan mendorong jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja”.

Inflasi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif dimana tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013. Berikut merupakan keadaan inflasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-tahun 2013 :



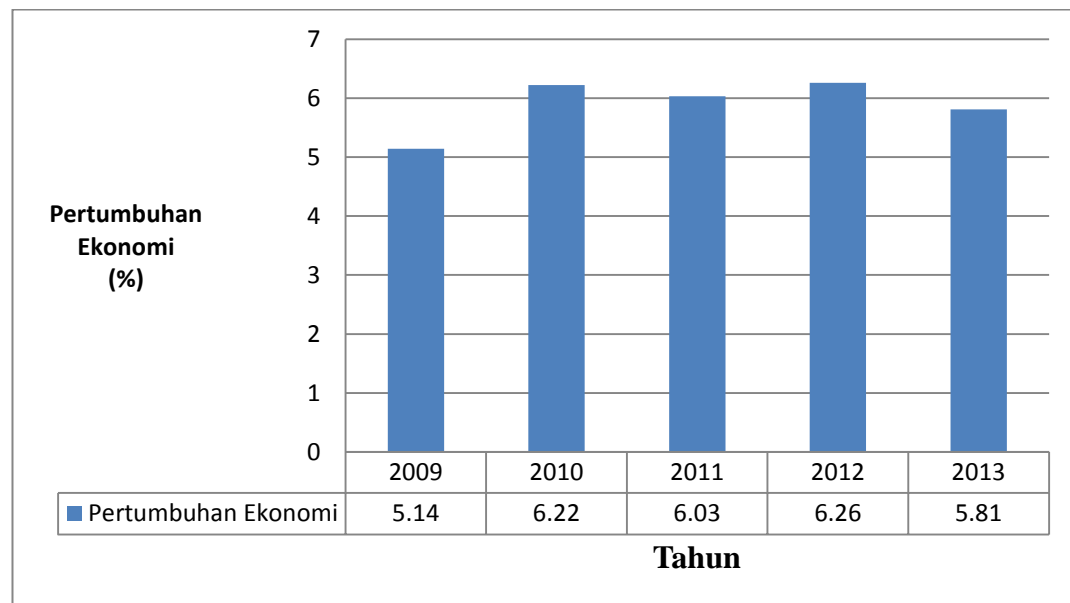
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.2.
Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009, tahun 2010, tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami golongan inflasi berat karena berkisar antara 30%-100%, namun pada tahun 2011 mengalami golongan inflasi sedang karena berkisar antara 10%-30% sebesar 2.68%.

Pengangguran terjadi karena adanya angkatan kerja yang tinggi, jika hal tersebut tidak diimbangi dengan laju kesempatan kerja maka pengangguran akan semakin bertambah. Hal tersebut berhubungan dengan laju pertumbuhan ekonomi, karena laju pertumbuhan mengindikasikan keadaan perekonomian pada suatu daerah. Semakin tinggi perekonomian pada suatu daerah maka akan mendorong kondisi perusahaan yang beroperasi sehingga aktivitas perusahaan akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 secara agregat cukup dinamis yaitu mencapai 5,81%, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 6.26%. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.3.

**Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2013**

Gambar 1.3 menunjukkan keadaan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, dengan laju pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas perekonomian bagi perusahaan yang berdampak pada perluasan kesempatan kerja.

Individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah umumnya mempunyai peluang kerja lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas. Jika dikaitkan dengan tingkat upah, individu yang berpendidikan rendah dapat lebih siap menerima semua jenis pekerjaan sedangkan individu yang memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas akan memiliki tingkat upah minimum yang mereka kehendaki.

Menurut Sutomo (1999) dalam Kusuma (2012:18), bahwa “Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik disebabkan karena semakin tinggi pendidikan akan meningkatkan aspirasinya

untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai, maka proses untuk mendapatkan pekerjaan di kalangan pencari kerja pendidikan menengah ke atas lebih lama, hal tersebut berkaitan dengan upah yang diterima”.

Setiap daerah memiliki tingkat upah minimum yang berbeda, semakin tinggi tingkat perekonomian maka upah yang ditawarkan akan semakin tinggi, jika semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan maka tingkat partisipasi kerja juga akan meningkat dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan lebih tinggi, jika kondisi tersebut tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja, maka pengangguran akan semakin meningkat.

Tingkat upah minimum regional di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2009-tahun 2013 mengalami kenaikan. Berikut tingkat upah minimum regional di Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 1.2.
Upah Minimum Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

Tahun	UMR (Rp)
2009	575.000
2010	660.000
2011	675.000
2012	760.000
2013	830.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Kesempatan kerja yang rendah, angkatan kerja yang tinggi, serta lapangan kerja yang jumlahnya terbatas adalah sebagian kecil persoalan yang selalu muncul dalam masalah pengangguran. Namun, pengangguran saat ini lebih didominasi oleh lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi (tenaga kerja terdidik)

mengakibatkan permasalahan pengangguran terdidik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013”**.

1.2. Rumusan Masalah

Kecenderungan meningkatnya jumlah pengangguran yang saat ini lebih didominasi oleh angkatan kerja lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan tidak menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan mendorong tingkat aspirasi untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah. Dengan keadaan tingkat inflasi yang tinggi akan mempengaruhi penurunan hasil produksi, sehingga perusahaan akan mengurangi tenaga kerja. Serta dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong semakin tingginya aktivitas perekonomian yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Pengangguran terdidik merupakan sebuah keadaan dimana tenaga kerja terdidik mengalami kondisi sulit untuk mendapatkan pekerjaan, alasannya bukan karena tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka, namun karena tenaga kerja terdidik lebih selektif dalam mencari pekerjaan. Seseorang yang memiliki pendidikan menengah ke atas akan lebih memilih menunggu waktu (menganggur)

dari pada mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai, hal ini berkaitan dengan upah yang diterima.

Pengangguran terdidik merupakan kegagalan kebijakan pemerintah dalam masalah ketenagakerjaan yang harus segera dibenahi karena berdampak pada merosotnya produktivitas sumber daya manusia. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas maka diambil beberapa pertanyaan agar penulisan penelitian mencapai tujuan yang diinginkan, sebagai berikut :

- 1.2.1. Adakah pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah ?
- 1.2.2. Bagaimana upaya pemerintah daerah agar tenaga kerja terdidik dapat memperoleh pekerjaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Mengetahui pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah.
- 1.3.2. Mengetahui upaya pemerintah daerah agar tenaga kerja terdidik dapat memperoleh pekerjaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi.
- b. Memperkaya referensi dan literatur mengenai pengangguran terdidik.
- c. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan penelitian pada tahap selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberikan bahan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi dan selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Menambahkan wacana pustaka bagi akademika Universitas Negeri Semarang yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa, khususnya mengenai masalah pengangguran terdidik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tenaga Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (2014:xvi) menyimpulkan bahwa “Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja yang berumur minimal 15 tahun atau lebih yang berpotensi dapat memproduksi barang atau jasa”.

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Pengertian umum tersebut sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No.14 tahun 1990, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sumarsono, 2009:7).

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja :

1. Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (2014:xvi) menyimpulkan bahwa “Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja”.

Angkatan kerja adalah penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta

bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan, digolongkan sebagai berikut (Sumarsono, 2009:7) :

- a. Mereka yang selama seminggu melakukan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan,
- b. Mereka yang selama seminggu tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari, tetapi mereka adalah orang-orang yang bekerja di bidang keahliannya.

2. Bukan Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (2014:xvi) menyimpulkan bahwa “Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi”.

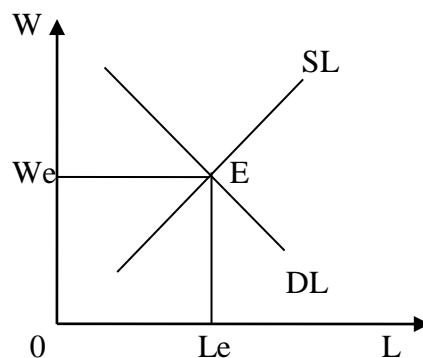
Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat di dalam kegiatan produktif yaitu yang memproduksi barang dan jasa, jadi bukan angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang tidak mampu mencari pekerjaan, digolongkan sebagai berikut (Sumarsono, 2009:7) :

- a. Golongan yang masih bersekolah,
- b. Golongan yang mengurus rumah tangga,
- c. Golongan lain-lain, yaitu golongan yang menerima pendapatan tanpa melakukan kegiatan dan golongan yang hidupnya tergantung pada orang lain.

2.2. Pasar Tenaga Kerja

Menurut Sumarsono (2009:10) menyimpulkan bahwa “Pasar tenaga kerja merupakan sebuah mekanisme atau aktivitas yang bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja”.

Pasar tenaga kerja dibentuk oleh dua kekuatan utama yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Pihak yang melakukan permintaan tenaga kerja adalah produsen. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama di dalam proses produksi barang dan jasa. Permintaan tenaga kerja terjadi pada pasar input, dimana struktur pasar input ini memiliki pasar persaingan sempurna atau tidak sempurna, hal ini akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan tingkat upah pasar (Santoso, 2012:60).



Sumber : Mankiw (2003:524)

Gambar 2.1.
Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Dimana :

W : Upah riil

We : Upah keseimbangan

L : Jumlah tenaga kerja

Le : Jumlah tenaga kerja keseimbangan

E : Keseimbangan permintaan dan penawaran

SL : Penawaran tenaga kerja (*Supply Of Labor*)

DL : Permintaan tenaga kerja (*Demand Of Labor*)

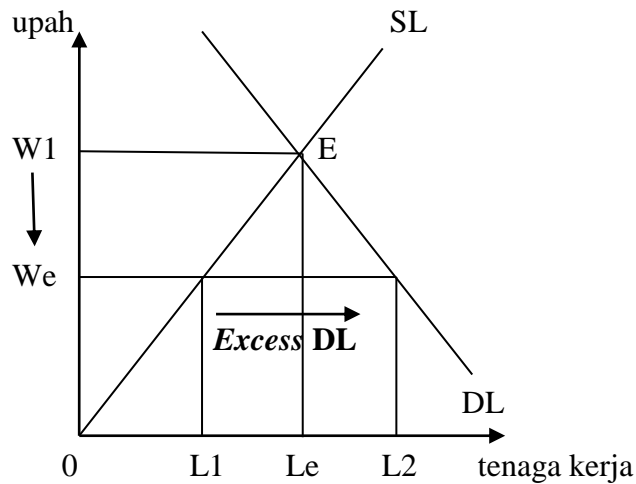
Gambar 2.1 memperlihatkan pasar tenaga kerja dalam kondisi seimbang (*equilibrium*). Dimana jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar L_e pada tingkat upah keseimbangan W_e . Titik-titik keseimbangan adalah titik E. Disini tidak ada *excess supply of labor* maupun *excess demand of labor*. Pada tingkat upah keseimbangan sebesar W_e maka semua orang yang ingin bekerja telah mendapat pekerjaan, berarti tidak ada orang yang menganggur (Mankiw, 2003:524).

1. Permintaan Tenaga Kerja (*Demand Of Labor*)

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, dimana hubungan keduanya biasanya bersifat negatif. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan barang atau jasa (Santoso, 2012:76).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi (Sumarsono, 2009:12).

Teori kurva permintaan tenaga kerja sebagai berikut :



Sumber : Subri (2003:55)

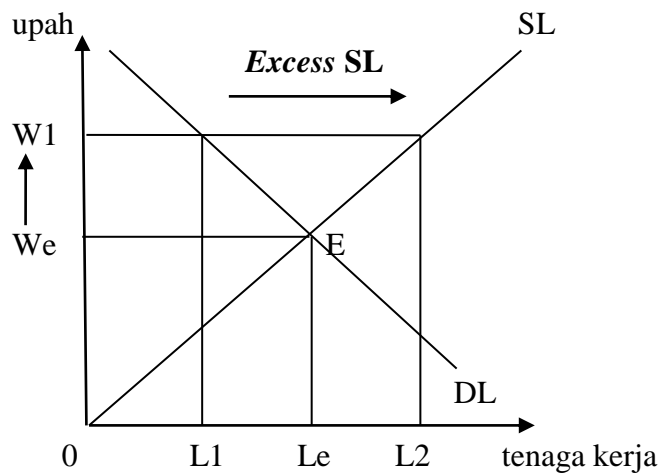
Gambar 2.2.
Excess Demand of Labor

Gambar 2.2 diketahui bahwa ketika tingkat upah turun, dari W_1 ke W_e akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah sebesar L_2 . Namun pada tingkat upah yang rendah, jumlah tenaga kerja yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebesar L_1 , sehingga pada L_1 dan L_2 terdapat kelebihan permintaan tenaga kerja (Subri, 2003:55).

2. Penawaran Tenaga Kerja (*Supply Of Labor*)

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus, akibatnya kenaikan dari upah akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan (Sumarsono, 2009:13).

Teori kurva penawaran tenaga kerja sebagai berikut :



Sumber : Subri (2003:54)

Gambar 2.3.
Excess Supply of Labor

Gambar 2.3 diketahui bahwa ketika tingkat upah naik, dari W_e ke W_1 akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah sebesar L_1 . Namun dengan tingkat upah yang tinggi, jumlah tenaga kerja yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebesar L_2 , sehingga pada L_1 dan L_2 terdapat kelebihan penawaran tenaga kerja (Subri, 2003:54).

3. Pasar Tenaga Kerja Terdidik dan Pasar Tenaga Kerja Tidak Terdidik

Pasar tenaga kerja terdidik adalah pasar tenaga kerja yang membutuhkan persyaratan dengan kualifikasi khusus yang biasanya diperoleh melalui jenjang pendidikan formal dan membutuhkan waktu yang lama serta biaya pendidikan yang cukup besar. Sedangkan pasar tenaga kerja tidak terdidik merupakan pasar tenaga kerja yang tidak membutuhkan kualifikasi khusus, seperti pendidikan dan keterampilan (Sumarsono, 2009:15).

Pasar tenaga kerja terdidik dan pasar tenaga kerja tidak terdidik merupakan dua kondisi yang sangat berbeda, dimana perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perbedaan Pasar Tenaga Kerja Terdidik dan Pasar Tenaga Kerja Tidak Terdidik

Pasar Tenaga Kerja Terdidik	Pasar Tenaga Kerja Tidak Terdidik
Produktifitas kerja tinggi	Produktifitas kerja rendah
Penghasilan karyawan tinggi	Penghasilan karyawan rendah
Tiap lowongan kerja selalu dikaitkan dengan pendidikan	Tiap lowongan kerja tidak selalu dikaitkan dengan pendidikan
Penyediaan tenaga kerja harus melalui sistem sekolah dan elastisitas tenaga kerja kecil	Penyediaan tenaga kerja tidak melalui sistem sekolah dan elastisitas tenaga kerja besar
Tingkat partisipasi kerja tenaga kerja terdidik lebih tinggi	Tingkat partisipasi kerja tenaga kerja tidak terdidik lebih rendah
Tenaga kerja biasanya datang dari keluarga yang relatif mampu/berada	Tenaga kerja biasanya berasal dari keluarga tidak mampu
Proses pengisian lowongan kerja untuk tenaga kerja terdidik dibutuhkan waktu lebih lama dalam proses seleksi	Proses pengisian lowongan kerja untuk tenaga kerja tidak terdidik dibutuhkan waktu lebih cepat
Lamanya pengangguran dikalangan tenaga kerja terdidik lebih lama	Lamanya pengangguran dikalangan tenaga kerja tidak terdidik pendek

Sumber : Sumarsono (2009:15)

2.3. Pengangguran

Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya (Sukirno, 2010:355).

Menurut Lipsey dkk (1992:06), Pengangguran dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{jumlah angkatan yang tidak bekerja}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Sukirno (2010:328) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya :

a. Pengangguran Friksional

Jenis pengangguran ini adalah bukan karena tidak ada pekerjaan atau tidak memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik.

b. Pengangguran Siklikal

Pengangguran ini disebabkan karena penurunan permintaan agregat, maka perusahaan akan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur kegiatan ekonomi. Perusahaan yang mengalami kemerosotan dan kemunduran karena beberapa faktor antara lain : kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu untuk bersaing, hal itu akan menyebabkan kegiatan produksi menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran yang disebabkan karena penggantian tenaga manusia oleh tenaga mesin dan bahan kimia (teknologi).

2.4. Pengangguran Terdidik

Pengangguran sendiri tidak hanya dialami oleh angkatan kerja yang memiliki pendidikan rendah, namun pengangguran saat ini juga dialami oleh angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas yaitu lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi, hal tersebut mencerminkan kemerosotan produktifitas sumber daya manusia dan kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya manusia.

Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja, hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya pengangguran terdidik. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, perlu tambahan keterampilan di luar bidang akademik. Disisi lain, para pengangguran terdidik mempunyai tingkat aspirasi yang tinggi seperti lebih memilih pekerjaan yang mendapatkan banyak fasilitas, mendapatkan kedudukan, dan langsung mendapatkan gaji besar.

Menurut Sari (2010:2) bahwa “Pengangguran terdidik secara potensial dapat menyebabkan berbagai macam masalah dengan tingkat rawan yang lebih tinggi, menciptakan pemborosan sumber daya pendidikan, dan menurunkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan karena tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan”.

Prasaja (2013:3) menyimpulkan bahwa penyebab pengangguran pada kalangan tenaga kerja terdidik lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi adalah “Untuk tamatan SMA tidak semuanya dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi karena terbentur masalah biaya, jadi para tamatan SMA lebih memilih

untuk bekerja. Kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa pekerjaan yang tersedia tidak cukup untuk menampung mereka. Sedangkan untuk tamatan Perguruan Tinggi juga banyak yang menganggur dikarenakan persaingan dunia kerja semakin ketat”.

Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Para pengangguran terdidik biasanya dari kelompok masyarakat menengah keatas yang memungkinkan adanya jaminan kelangsungan hidup meski menganggur. Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan masalah pendidikan pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan dan kesiapan tenaga pendidik (Astuti, 2014:3).

Menurut Badan Pusat Statistik pada buku Profil Ketenagakerjaan (2010:9) bahwa “Tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SLTA, Sarjana Muda, atau Sarjana (sebagai kelompok terdidik) yang tidak bekerja”.

Selain itu menurut Sumarsono (2009:253), bahwa “Pengangguran terdidik adalah angkatan kerja yang berpendidikan menengah ke atas yaitu SMA, Diploma, dan Sarjana yang tidak bekerja. Pengangguran tenaga kerja terdidik adalah salah satu masalah makro ekonomi, adapun faktor-faktor penyebab tenaga kerja terdidik dapat dikatakan hampir sama di setiap negara, yaitu krisis ekonomi, struktur lapangan kerja yang tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan penyediaan tenaga kerja terdidik tidak seimbang, dan jumlah angkatan kerja yang lebih besar jika dibandingkan dengan kesempatan kerja”.

Menurut Rahmawati dan Hadiwiyono dalam Astuti (2014:3) bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga kerja terdidik adalah :

- a. Adanya penawaran tenaga kerja yang melebihi dari permintaan,
- b. Kebijakan rekrutmen tenaga kerja sering tertutup,
- c. Perguruan tinggi sebagai proses untuk menyiapkan lulusan atau tenaga kerja yang siap pakai belum berfungsi sebagaimana mestinya,
- d. Adanya perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan struktur industri.

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan diatas, maka pengangguran terdidik adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke atas (termasuk angkatan kerja) menurut tingkat pendidikan yaitu lulusan SLTA/Kejuruan, Diploma, atau Sarjana (tenaga kerja terdidik) yang sedang mencari pekerjaan, belum bekerja, atau tidak bekerja.

Indikator pengangguran terdidik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah seseorang yang termasuk angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dilihat dari tingkat pendidikan lulusan SLTA/Kejuruan, Diploma, dan Sarjana yang dihitung dalam satuan jiwa di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-tahun 2013.

2.5. Inflasi

Salah satu keadaan perekonomian yang diidamkan oleh seluruh negara adalah memiliki keadaan perekonomian dengan tingkat inflasi yang rendah dan dapat mempertahankan tingkat kestabilan harga atau mencegah inflasi.

Inflasi adalah kenaikan terus menerus dalam rata-rata tingkat harga suatu perekonomian akibat adanya kenaikan permintaan agregat atau penurunan penawaran agregat. Inflasi karena kenaikan permintaan agregat sering disebut dengan *demand pull inflation*, sedangkan inflasi karena penurunan penawaran agregat sering disebut dengan *cost push inflation* (McEachern, 2000:133).

Daya tarik permintaan atau *demand pull inflation* yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat, sedangkan daya dorong penawaran atau *cost push inflation* yaitu inflasi yang timbul karena adanya goncangan/dorongan kenaikan biaya faktor-faktor produksi secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009:198).

Menurut Samuelson (2004:382) menyimpulkan bahwa inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik dan dapat dihitung menggunakan rumus :

$$L_t = \frac{IHU_t - IHU_{t-1}}{IHU_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

- L_t : Laju inflasi
 IHU_t : Harga umum tahun sekarang
 IHU_{t-1} : Harga umum tahun lalu

Menurut Prasetyo (2009:198), inflasi dapat digolongkan berdasarkan tingkat parah dan tidaknya dilihat dari berbagai tingkatan, yaitu :

- a. Inflasi Ringan (kurang dari 10% per tahun)
- b. Inflasi Sedang (antara 10% sampai 30% per tahun)
- c. Inflasi Berat (antara 30% sampai 100% per tahun)
- d. *Hiperinflasi* (lebih dari 100% per tahun)

Sedangkan menurut asalnya dapat dibagi menjadi dua yaitu (Prasetyo, 2009:201) :

a. Inflasi dari dalam negeri (*Domestic Inflation*)

Inflasi jenis ini dapat disebabkan karena perilaku konsumtif masyarakat atau pamer kekayaan, sehingga harga-harga barang menjadi naik.

b. Inflasi dari luar negeri (*Imported Inflation*)

Inflasi yang berasal dari luar negeri ini pada umumnya dapat terjadi karena adanya kelangkaan sumber daya secara umum yang terjadi diluar negeri.

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan diatas, inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum barang dan jasa secara terus menerus.

Indikator inflasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi yang diukur melalui perubahan harga-harga yang berlaku secara umum yang dihitung dalam satuan persen di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-tahun 2013.

2.6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan domestik bruto tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Pada definisi yang lain, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang atau jasa yang diproduksi

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2010:9).

Menurut Kuznet dalam Todaro (2004:99) bahwa “Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya faktor produksi. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya”.

Prasetyo (2009:237) menyimpulkan bahwa “Laju pertumbuhan ekonomi akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu”. Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

$$\Delta PDB = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

ΔPDB : Laju pertumbuhan ekonomi

PDB_t : *Produk Domestik Bruto* tahun sekarang

PDB_{t-1} : *Produk Domestik Bruto* tahun lalu

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan diatas, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara karena memperlihatkan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.

Indikator pertumbuhan ekonomi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pembangunan ekonomi daerah diukur melalui laju pertumbuhan ekonomi, pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan dengan menghitung pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) menurut harga konstanta yang dihitung dalam satuan persen di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-tahun 2013.

2.7. Upah

Sukirno (2010:58) menyimpulkan bahwa “Upah diartikan sebagai pembiayaan jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran atas jasa-jasa tetap dan profesional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap”.

Teori Neoklasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha memperkerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut, tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha dapat dihitung menggunakan rumus (Sumarsono, 2009:150) :

$$W = WMPPL = MPPL \times P$$

Dimana :

- W :Tingkat upah (*labour cost*) yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan
- WMPPL :*Marginal physical product of labour* atau pertambahan hasil marginal pekerja, diukur dalam unit barang per unit waktu
- MPPL :*Volume of marginal physical product of labour* atau nilai pertambahan hasil marginal pekerja atau karyawan
- P :Harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang

Dalam teori Neoklasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang kepada pengusaha, upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai atau sama dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan kepada pengusaha (Sumarsono, 2009:150).

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan diatas, upah merupakan suatu imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang.

Indikator upah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tingkat upah dilihat dari besarnya upah yang diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan bekerja atas dasar upah minimum regional (UMR) yang dihitung dalam satuan rupiah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-tahun 2013.

2.8. Hubungan Antara Variabel Dependent dan Independent

2.8.1. Hubungan Antara Inflasi dan Pengangguran Terdidik

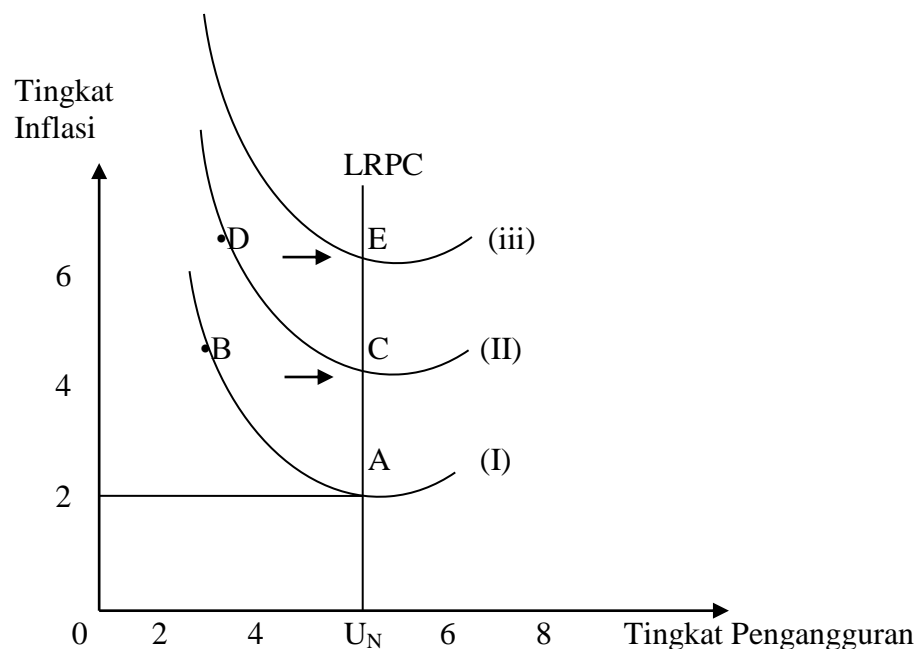
Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2008:152).

Studi tentang hubungan inflasi dengan pengangguran menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda. A.W. Phillips (1958) yang pertama kali melakukan studi ini berpandangan adanya *trade off* antara inflasi dengan pengangguran, pandangan ini dikenal dengan *Phillips Curve* jangka pendek. Namun, Edmund Phelps dan Milton Friedman berpendapat lain karena kenyataannya di Amerika Serikat selama periode tertentu menunjukkan bahwa kenaikan tingkat inflasi diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran (tidak terdapat *trade off*), sehingga terdapat perbedaan antara kurva Phillips jangka panjang dengan kurva Phillips jangka pendek (Samuelson, 2004:406).

Menurut Edmund Phelps dan Milton Friedman, bahwa inflasi memiliki pergerakan searah dengan pengangguran. Ketika harga barang dan jasa meningkat, pengangguran juga akan naik. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi akan mendorong perusahaan untuk mengurangi barang dan jasa

yang diproduksi untuk mencapai tingkat produksi yang efisien. Dengan pengurangan tingkat produksi akan menyebabkan penggunaan faktor produksi, termasuk tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi akan berkurang. Hal ini akan meningkatkan pengangguran. Jadi kenaikan harga barang dan jasa akan meningkatkan pengangguran (Samuelson, 2004:407).

Kurva Phillips jangka panjang dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai berikut :



Sumber : Zahrotul (2013:28)

Gambar 2.4.
Kurva Phillips Jangka Panjang

Gambar 2.4 menurut ahli ekonomi berpendapat bahwa kurva jangka panjang berbentuk tegak lurus, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh kurva LRPC (*Long Range Planing Commite*). Dari analisis ini dapat disimpulkan : Apabila pengangguran telah mencapai tingkat pengangguran alamiah, usaha-usaha

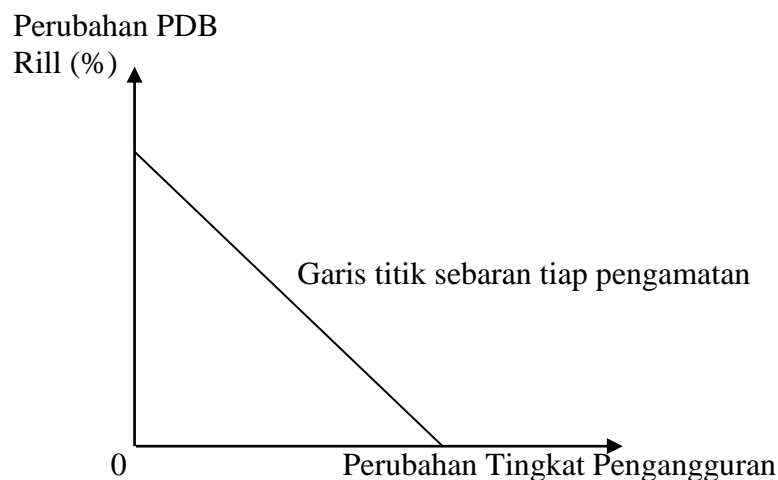
pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran pada akhirnya bukan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran tetapi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Dengan kata lain, dalam jangka panjang kurva Phillips berbentuk tegak lurus (vertikal), pengangguran akan tetap sebesar U_N walaupun tingkat inflasi akan tinggi (Zahrotul, 2013:29).

2.8.2. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terdidik

Menurut Badan Pusat Statistik (2013:62) menyimpulkan bahwa “Laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja, artinya jika ada pertumbuhan ekonomi maka penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi meningkat per 1%, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang”.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dilihat dari hukum okun yang menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen PDB yang berhubungan dengan PDB potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hukum Okun menyediakan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja, yang menggambarkan asosiasi antara pergerakan jangka pendek pada PDB riil dan perubahan angka pengangguran” (Samuelson, 2004: 365).

Hukum okun yang dikenal dengan kurva okun dapat dilihat pada gambar 2.5 sebagai berikut :



Sumber : Samuelson (2004:365)

Gambar 2.5.
Kurva Okun

Gambar 2.5 menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran. Hukum Okun tersebut dapat digunakan sebagai solusi negara yang sedang berkembang yang rawan terhadap masalah pengangguran, dengan meningkatnya nilai PDB akan mendorong meningkatnya jumlah lapangan kerja yang disebabkan karena meningkatnya aktivitas perekonomian bagi perusahaan dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

2.8.3. Hubungan Antara Upah dan Pengangguran Terdidik

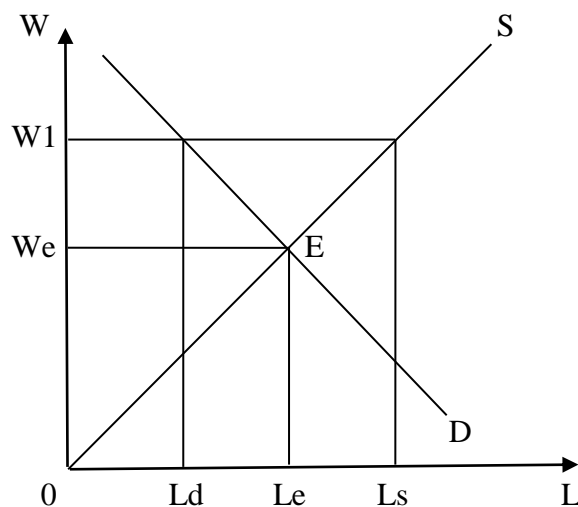
Menurut Mankiw (2003:140) menyimpulkan bahwa “Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, karena naiknya upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran”.

Menurut Alghofari (2008:15) menyimpulkan bahwa “Tenaga kerja menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu. Jika seluruh

upah yang ditawarkan besarnya di bawah tingkat upah tersebut, seorang pekerja akan menolak mendapatkan upah tersebut dan hal ini akan menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Apabila ditinjau dari sisi pengusaha, meningkatnya upah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat pada peningkatan pengangguran”.

Kenaikan tingkat upah produk riil pada keseluruhan sistem ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap, berarti bahwa beberapa pabrik dan perusahaan tidak akan mampu lagi menutup biaya-biaya variabel mereka sehingga akan gulung tikar. Jika perusahaan melakukannya, maka tingkat pengangguran akan naik (Lipsey dkk, 1992:284).

Menurut Sumarsono (2009:259) menyimpulkan bahwa “Adanya hubungan positif antara tingkat upah dengan pengangguran, karena apabila tingkat upah mengalami peningkatan maka mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja menjadi kecil dan pengangguran akan semakin meningkat”, hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.6 sebagai berikut :



Sumber : Sumarsono (2009:259)

Gambar 2.6.
Pengangguran Tingkat Upah

Tingkat keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja adalah di titik E yaitu dengan tingkat upah sebesar W_e dan permintaan tenaga kerja sebanyak L_e . Sedangkan apabila tingkat upah meningkat atau lebih tinggi dari pada upah keseimbangan (W_e) yaitu sebesar W_1 , maka permintaan tenaga kerja akan lebih kecil yaitu sebesar L_d , sehingga terjadi pengangguran sebesar $L_d - L_s$ (Sumarsono, 2009:259).

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan pengangguran terdidik. Beberapa penelitian terdahulu yang diambil dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 2.2.
Penelitian Terdahulu

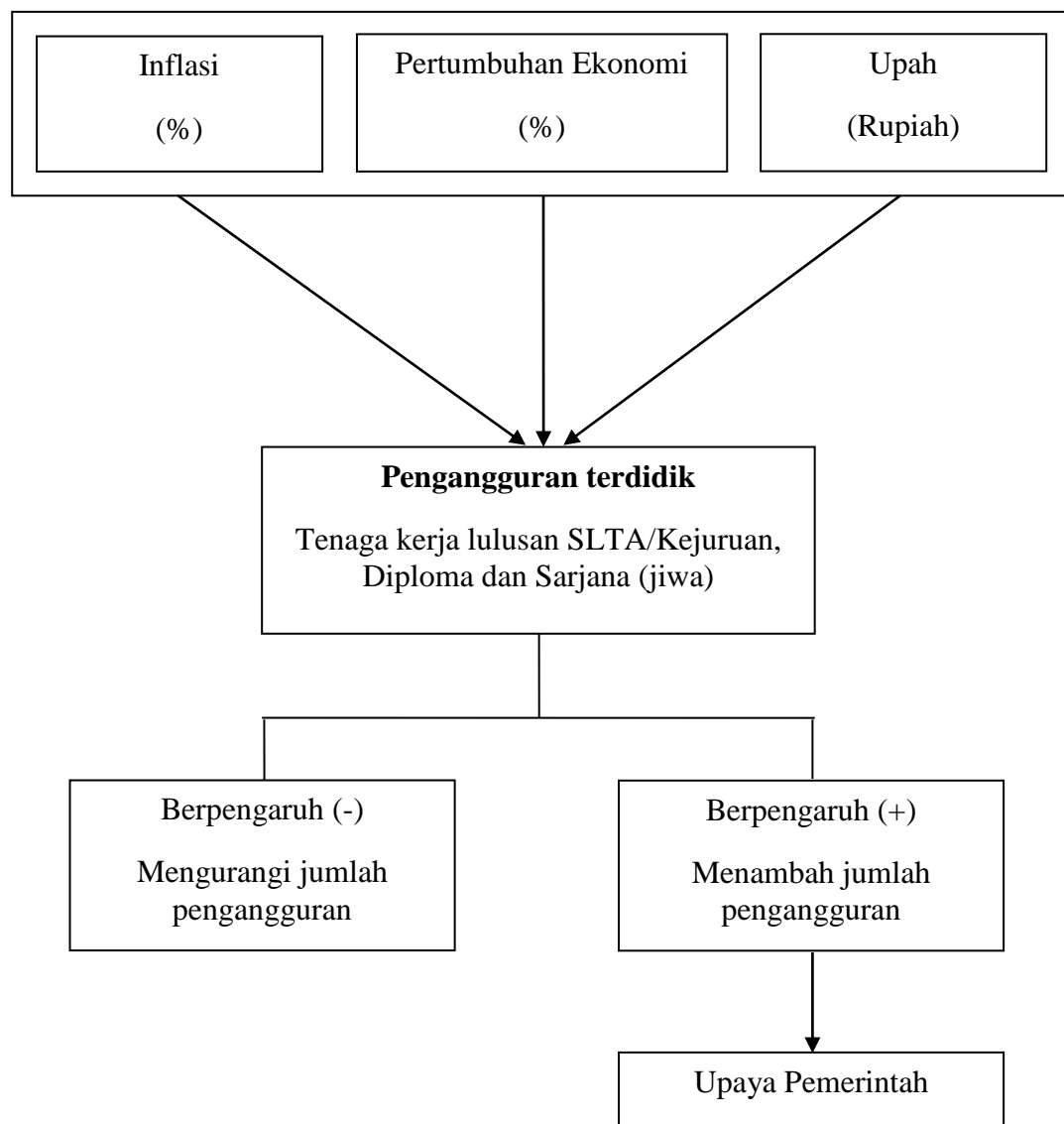
No	Penulis, Judul, dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1	Mukti Hadi Prasaja Judul : “Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011”	Variabel dependen yaitu pengangguran terdidik. Variabel independen yaitu investasi asing (satuan dollar/US\$), jumlah penduduk (satuan jiwa), dan inflasi (satuan persen).	Model Regresi Linear Berganda : $\ln Y = \beta_0 - \beta_1 \ln IA + \beta_2 \ln JP + \beta_3 \ln \text{Inflasi} + e$ Pengangguran Terdidik = $-109.1273 - 0.321706 \ln IA + 7.241755 \ln JP + 0.003930 \ln \text{Inflasi} + e$ F-Statistik = 11.11030 R ² = 0.543460	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel investasi asing mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik. 2. Variabel jumlah penduduk mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik. 3. Variabel inflasi mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik. 4. Variabel investasi asing, jumlah penduduk, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap pengangguran terdidik.

No	Penulis, Judul, dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
2	<p>Anggun Kembar Sari</p> <p>Judul : “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat Periode Tahun 2008-2010”</p>	<p>Variabel dependen yaitu pengangguran terdidik.</p> <p>Variabel independen yaitu tingkat pendidikan (satuan persen), pertumbuhan ekonomi (satuan persen) dan upah (dalam ribuan).</p>	<p>Model Regresi Panel :</p> $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 - \beta_3 \text{Log } X_3 + e$ $Y = 31,753 + 0,873X_1 + 0,227X_2 - 1,809 \text{Log } X_3$ <p>F-Statistik = 31.18502 $R^2 = 0.638361$</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel tingkat pendidikan mempunyai hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik. 2. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik. 3. Variabel upah mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik. 4. Variabel tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan upah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, artinya secara bersama-sama ketiga variabel bebas mempengaruhi pengangguran terdidik.

No	Penulis, Judul, dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
3	Purwaka Hari Prihanto, SE, M.si Judul : “ Tren dan Determinan Pengangguran Terdidik di Provinsi Jambi Periode Tahun 1990-2009”	Variabel dependen yaitu pengangguran terdidik. Variabel independen yaitu tingkat upah (UPAH), pendapatan perkapita (PCAP), kesempatan kerja di sektor formal (FORM) dan kesempatan kerja di sektor informal (INFOR).	Persamaan (1) $\text{LogPTDD} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogUPAH} + \beta_2 \text{LogPCAP} + \beta_3 \text{LogFORM} + \beta_4 \text{LogINFORM} + \mu$ Persamaan (2) $\text{LogPTDD} = -45,045 - 0,568 \text{LogUPAH} + 0,718 \text{LogPCAP} - 1,806 \text{LogFORM} + 9,78 \text{LogINFORM}$ $t = (-3,770) * (-2,285) * (3,186) * (-1,377) * (2,936) *$ $R^2 = 234,862 *$	Hasil estimasi model regresi berganda diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,992, artinya hubungan antara variabel tingkat upah, pendapatan per kapita, kesempatan kerja di sektor formal dan kesempatan kerja di sektor informal dengan pengangguran terdidik adalah sangat kuat. Sedangkan berdasarkan uji hipotesis secara serentak menggunakan uji F-statistik dengan tingkat kepercayaan 95 persen, tingkat upah, pendapatan perkapita, kesempatan kerja di sektor formal dan kesempatan kerja di sektor informal berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik.

2.10. Kerangka Berfikir

Penelitian ini membahas mengenai pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2009-2013, adapun kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.7.
Kerangka Berfikir

Gambar 2.7 menerangkan sistematika penulisan dalam penelitian pengangguran terdidik yang dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah. Dimana pengangguran terdidik sebagai variabel dependen yang diukur melalui jumlah pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan, yaitu lulusan SLTA/Kejuruan, Diploma, dan Sarjana yang belum/tidak memperoleh pekerjaan dalam satuan jiwa. Sedangkan variabel independennya yaitu, tingkat inflasi yang dilihat dari besarnya perubahan harga-harga berlaku secara umum dalam satuan persen, pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dalam satuan persen dan upah yang dilihat dari besarnya upah yang diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan bekerja atas dasar upah minimum regional (UMR) dalam satuan rupiah.

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan regresi data panel (kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*) di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama 2009-2013.

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat berpengaruh negatif ataupun positif. Berpengaruh negatif jika dapat mengurangi jumlah pengangguran terdidik, namun jika berpengaruh positif dapat menambah jumlah pengangguran terdidik, sehingga akan dibahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah pengangguran terdidik dengan menggunakan metode wawancara.

2.11. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti di bawah dan *thesa* yang berarti kebenaran) (Hasan, 2004:31).

Di dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan cara dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap pengangguran terdidik karena semakin tinggi inflasi akan menurunkan hasil produksi yang berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan sehingga pengangguran akan bertambah.
- b. Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap pengangguran terdidik karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan aktivitas perusahaan yang beroperasi dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran akan berkurang.
- c. Upah mempunyai pengaruh positif terhadap pengangguran terdidik karena semakin tinggi tingkat upah maka perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga pengangguran akan bertambah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber

Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013”, dalam menyusun penelitian tersebut digunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung. Adapun penjelasan mengenai data sekunder dan data primer adalah sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu (Hasan, 2004:19). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi terkait yakni, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, meliputi data pengangguran menurut tingkat pendidikan, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah.

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian dan diperoleh melalui kuesioner, wawancara, survei, observasi dll (Hasan, 2004:19). Data primer

dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui metode wawancara kepada instansi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani masalah pengangguran terdidik.

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian (Arikunto, 2010:161).

a. Variabel Dependen

Variabel Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengangguran terdidik, yaitu seseorang yang termasuk angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dilihat dari tingkat pendidikan lulusan SLTA/Kejuruan, Diploma, dan Sarjana yang dihitung dalam satuan jiwa di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013 dan data yang diperoleh melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

b. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Inflasi

Tingkat inflasi dilihat dari besarnya perubahan harga-harga yang berlaku secara umum yang hitung dalam satuan persen di Provinsi Jawa Tengah

pada tahun 2009-2013 dan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dari perhitungan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) atas dasar harga konstan yang dihitung dalam satuan persen di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013 dan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

3. Upah

Tingkat upah dilihat dari besarnya upah yang diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan bekerja atas dasar upah minimum regional (UMR) yang dihitung dalam satuan rupiah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013 dan data yang diperoleh melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian (Hasan, 2004:23). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data sekunder dari instansi-instansi terkait, yaitu Badan Pusat

Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

b. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti (Hasan, 2004:24). Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Metode Analisis

Hasan (2004:29) menyimpulkan bahwa “Analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (*ide*) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis”.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis adalah Regresi Data Panel untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah.

3.4.1. Analisis *Polled Data*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menggunakan data *time series* atau *cross section* saja.

Menurut Gujarati (2012:237) menyimpulkan bahwa data panel (*Pooled Data*) atau yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Terdapat beberapa keunggulan dengan menggunakan data panel :

- a. Dengan menggabungkan antara observasi *time series* dan *cross section*, data panel memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, lebih banyak efisiensi, lebih banyak *degree of freedom* dan sedikit kolinearitas antar variabel.
- b. Oleh karena data yang berhubungan dengan individu, perusahaan, negara bagian dari waktu ke waktu terdapat batasan heterogenitas dalam setiap unit tersebut. Dengan teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas tersebut.
- c. Dengan mempelajari observasi *cross section* yang berulang-ulang, data panel paling cocok untuk mempelajari dinamika perubahan.
- d. Data panel dapat meminimumkan bias apabila kita mengagregasi individu/perusahaan besar.
- e. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit.
- f. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur dampak secara sederhana.

Selain keunggulan tersebut, menurut Verbeek (2000), Gujarati (2003), Wibisono (2005), Aulia (2004:27) dalam buku Ajija dkk (2011:52) menyimpulkan bahwa “Keunggulan lain pada data panel yaitu data panel

memiliki implikasi tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik”, maka data panel tidak membutuhkan pengujian asumsi klasik seperti normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Penjelasan lain mengapa tidak membutuhkan pengujian normalitas dan multikolinieritas adalah sebagai berikut :

- a. Uji normalitas hanya digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30, untuk mengetahui apakah *error term* mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas karena distribusi sampling *error term* mendekati normal (Ajija dkk, 2011:42). Dalam penelitian ini menggunakan jumlah observasi 175 maka uji normalitas dapat diabaikan.
- b. Penelitian ini menggunakan data panel sehingga masalah multikolinieritas ini dapat diabaikan mengingat penggabungan data *cross section* dan multikolinieritas merupakan *rule of thumbs* (Gujarati, 2010:365).

Sedangkan tidak membutuhkan pengujian heteroskedastisitas dan autokorelasi disebabkan karena penelitian ini menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) atau dengan pembobotan, berikut merupakan penjelasannya :

- a. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas tidak dilakukan karena model regresi menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) sehingga terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan variabel gangguan yang mempunyai varian tidak konstan dari observasi satu ke observasi yang lain. Metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang umum tidak mengasumsikan bahwa varian dari variabel adalah

heterogen, dan pada kenyataannya varian data pada data panel cenderung heterogen. Metode ini sudah memperhitungkan heterogenitas yang terdapat pada variabel independen secara eksplisit sehingga metode ini mampu menghasilkan estimator yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Gujarati, 2010:472).

- b. *Generalized Least Square* (GLS) adalah sebuah metode untuk membuang autokorelasi urutan pertama pada sebuah estimasi persamaan regresi. Hal ini juga ditegaskan bahwa penggunaan metode GLS dapat menekan adanya autokorelasi yang biasanya timbul dalam kesalahan estimasi varian sehingga dengan metode GLS masalah autokorelasi dapat diatasi (Sarwoko, 2005:144).

Estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode *Pooled Least Square* (*Common Effects*), metode efek tetap (*Fixed Effects*) dan metode efek acak (*Random Effects*). Adapun penjelasan mengenai ketiga model estimasi tersebut adalah sebagai berikut (Ajija dkk, 2011:51) :

- a. Metode *Pooled Least Square* (*Common Effects*)

Model ini dikenal dengan estimasi *common effects* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasi data *time series* dan *cross section*. Model ini hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan model *Ordinary Least Square* (OLS) karena menggunakan kuadrat terkecil biasa.

Dalam pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa penelitian data panel, model ini sering kali tidak pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.

b. Metode Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effects*)

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka atau dummy yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effects*) atau *Least Square Dummy Variabel* atau disebut juga dengan *Covariance Model*. Pada metode *fixed effects* estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobotan (*No Weight*) atau *Generalized Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterosgenitas antar unit *cross section*. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dan sering digunakan dalam mengestimasi karena model ini merupakan model terbaik.

c. Metode Pendekatan Efek Acak (*Random Effects*)

Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam eror, karena hal inilah model efek acak juga disebut model komponen eror (*Error Component Model*).

Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap.

Keputusan pemakaian *common effects model*, *fixed effects model* ataupun *random effects model* ditentukan dengan uji *likelihood test ratio* dan uji *hausman test*, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemilihan model antara *common effects* dengan *fixed effects* dapat dilakukan dengan pengujian *likelihood test ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diambil keputusan dengan menggunakan *fixed effects model*, namun apabila sebaliknya maka model yang digunakan adalah *common effects model*.
- b. Pemilihan model antara *fixed effects* dengan *random effects* dapat dilakukan dengan pengujian *hausman test* dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat memilih salah satu model yang terbaik antara *fixed effects model* dan *random effects model*, namun apabila sebaliknya maka model yang digunakan adalah *fixed effects model*.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *Polled Generalized Least Square*, yang pada intinya memberikan pembobotan kepada variasi data yang digunakan, yaitu kuadrat varians dari model. Tujuan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.2. Spesifikasi Model Regresi

Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat adanya perbedaan satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma. Menurut Imam Ghozali (2005)

dalam skripsi Pranata (2013:49) menyimpulkan bahwa alasan pemilihan logaritma adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari adanya heteroskedastisitas,
- b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas,
- c. Mendekatkan skala.

Persamaan yang digunakan untuk mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2013 dalam penelitian ini menggunakan matematis model regresi double log linier sebagai berikut :

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + e_{it}$$

Dimana :

$\ln Y$	= Pengangguran Terdidik (dalam satuan jiwa)
X_1	= Inflasi (dalam satuan persen)
X_2	= Pertumbuhan Ekonomi (dalam satuan persen)
$\ln X_3$	= Upah (dalam satuan rupiah)
β_0	= Konstanta
β_1	= Koefisien Regresi X_1 (inflasi)
β_2	= Koefisien Regresi X_2 (pertumbuhan Ekonomi)
β_3	= Koefisien Regresi X_3 (upah)
e	= <i>Error Term</i>

3.4.3. Pengujian Statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Parsial (t-Statistik), dan Uji F-statistik.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*Goodnes Of Fit*) digunakan koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi menunjukkan variasi turunan Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X.

Menurut Gujarati (2003) dalam buku Ghozali (2009:16) menyimpulkan bahwa “Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 0 (nol) berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variasi variabel dependen”.

b. Uji Parsial (t-Statistik)

Uji t-Statistik pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel.

Menurut Ghozali (2009:17) menyimpulkan bahwa pada tingkat $\alpha = 5\%$ maka kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

- Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya salah satu variabel bebas (independen) tidak mempengaruhi variabel terikat (dependent) secara signifikan.
- Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya salah satu variabel bebas (independen) mempengaruhi variabel terikat (dependen) secara signifikan.

c. Uji F-statistik

Uji F-statistik dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut (Ghozali, 2009:16) :

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- $H_A : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, jika sebaliknya maka H_0 diterima (Ghozali, 2009:17).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

- 5.1.1. a. Variabel inflasi mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013.
- b. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013.
- c. Variabel upah mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013.
- d. Variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terdidik.
- 5.1.2. a. Upaya yang dilakukan pemerintah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dalam menangani masalah pengangguran terdidik adalah dengan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

- b. Upaya yang dilakukan pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah dalam menangani masalah pengangguran terdidik adalah melalui peningkatan perbaikan infrastruktur yang bertujuan untuk menarik minat para investor.

5.1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di dapat, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah dalam menyiasati permasalahan inflasi yang relatif tinggi dan tidak stabil yaitu dengan cara memberikan *insentif tax holiday*, yaitu memberikan kemudahan bagi calon investor dalam hal penanaman modal dan menjamin keamanan berinvestasi melalui promosi potensi dan perbaikan infrastruktur namun tetap diperhatikan bahwa PMDN tetap harus lebih besar dari PMA.
- b. Dengan terdapatnya pengaruh yang tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah, maka diharapkan lagi kepada pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan 9 sektor dalam PDRB agar kesembilan sektor tersebut mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Diharapkan bagi perusahaan agar lebih memperhatikan lagi kesejahteraan para pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas sumber daya

manusia, selain itu dapat meningkatkan penawaran tenaga kerja terdidik yang berdampak pada menurunnya jumlah pengangguran terdidik.

- d. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R,dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alghofari, Farid. 2008. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Wurdianti Yuli. 2014. Pengangguran Terdidik di Perkotaan. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.
- Badan Pusat Statistik. Tahun 2009-2013. *Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Hasil Sakernas Agustus 2009*. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. Tahun 2009-2013. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Agustus 2009*. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. Tahun 2009-2014 . *Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009*. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2009-2013. *Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah 2009*. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan. 2013. *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013*. Jawa Tengah: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.
- Gujarati, D. N. dan D. C. Porter. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kusuma, Wuri Anggun. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lamanya Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Lipsey, G. Richard, dkk. 1992. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pranata, Okta Ryan. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Prasaja, Mukti Hadi. 2013. Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Prasetyo, P. Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Santoso, Rokhedi Priyo. 2012. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sari, Anggun Kembar. 2010. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Di Sumatera Barat Tahun 2008-2010. *Skripsi*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sarwoko. 2005. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Samuelson, P. A. dan W. D. Nordhaus. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori Dan Kebijakan Publik Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyuthi, M. Djamil. 1989. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: P2LPTK.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

McEachern, W. A. 2000. *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Zahrotul, Azizah. 2013. Inflasi Hubungannya dengan Kesempatan Kerja dan Pengangguran. *Journal of Indonesian Applied Economics*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Jumlah Pengangguran Terdidik, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah

Kabupaten	Tahun	Pggr (jiwa)	Inflas (%)	Peko (%)	Umk (Rp)
Cilacap	2009	38254	4.63	5.25	664333.3
cilacap	2010	32577	5.65	5.65	698333.3
cilacap	2011	17960	5.27	5.78	718666.7
cilacap	2012	16265	6.87	5.59	773000
cilacap	2013	16381	8.37	5.75	887667
banyumas	2009	33226	2.83	5.49	612500
banyumas	2010	25354	6.04	5.77	670000
banyumas	2011	19509	3.4	5.95	750000
banyumas	2012	15458	4.73	5.88	795000
banyumas	2013	15001	8.5	6.71	877500
purbalingga	2009	6805	3.35	5.89	618750
purbalingga	2010	5579	7.82	5.67	695000
purbalingga	2011	7409	4.47	6.03	765000
purbalingga	2012	6022	4.09	6.26	818500
purbalingga	2013	6634	9.57	5.66	896500
banjarnegara	2009	11442	4.37	5.11	637000
banjarnegara	2010	6635	7.13	4.89	662000
banjarnegara	2011	5722	4.73	4.92	730000
banjarnegara	2012	4630	4.55	5.25	765000
banjarnegara	2013	10187	8.35	5.28	835000
kebumen	2009	25116	5.01	3.94	641500
kebumen	2010	18421	8.36	4.15	700000
kebumen	2011	14783	4.52	4.23	727500
kebumen	2012	8437	4.64	5.59	770000
kebumen	2013	9004	10.46	4.2	835000
purworejo	2009	13039	3.98	4.96	643000
purworejo	2010	8759	7.56	5.01	719000
purworejo	2011	9118	2.52	5.02	755000
purworejo	2012	7844	3.66	5.04	809000
purworejo	2013	9740	7.14	4.99	849000
wonosobo	2009	5873	3.01	4.02	667000
wonosobo	2010	7305	6.06	4.29	715000
wonosobo	2011	8671	2.66	4.52	775000
wonosobo	2012	4451	3.84	5.14	825000

wonosobo	2013	7230	8.82	4.98	880000
magelang	2009	15087	3.83	4.72	702000
magelang	2010	10214	8.25	4.51	752000
magelang	2011	22138	2.64	4.27	802500
magelang	2012	11118	2.59	5.84	870000
magelang	2013	18593	8.34	5.6	942000
boyolali	2009	15408	2.05	5.16	718500
boyolali	2010	9281	7.34	3.6	748000
boyolali	2011	16391	3.35	5.28	800500
boyolali	2012	13128	3.45	5.66	836000
boyolali	2013	15555	8.21	5.43	895000
klaten	2009	25981	0.3	4.24	685000
klaten	2010	20125	7.9	1.73	735000
klaten	2011	21374	1.67	1.96	766022
klaten	2012	10278	3.65	5.54	812000
klaten	2013	16539	7.92	5.79	871500
sukoharjo	2009	21911	2.59	4.76	710000
sukoharjo	2010	18234	6.67	4.65	769500
sukoharjo	2011	13993	2.63	4.59	790500
sukoharjo	2012	14556	4.22	5.03	843000
sukoharjo	2013	16297	8.42	5.01	902000
wonogiri	2009	15762	2.89	4.73	650000
wonogiri	2010	13443	6.66	5.87	695000
wonogiri	2011	5654	3	2.24	730000
wonogiri	2012	3927	3.43	5.87	775000
wonogiri	2013	7394	8.6	4.36	830000
karanganyar	2009	24875	2.96	5.54	719000
karanganyar	2010	12365	7.26	5.42	761000
karanganyar	2011	12953	3.31	5.5	801500
karanganyar	2012	15396	3.29	5.82	846000
karanganyar	2013	10049	8.7	5.38	896500
sragen	2009	17805	2.82	6.01	687000
sragen	2010	11259	6.77	6.09	724000
sragen	2011	11586	2.86	6.53	760000
sragen	2012	11639	3.74	6.6	810000
sragen	2013	10070	7.55	6.64	864000
grobogan	2009	18608	4.26	5.03	640000
grobogan	2010	12309	7.45	5.05	687500
grobogan	2011	15414	1.86	3.59	735000

grobogan	2012	8759	4.48	6.16	785000
grobogan	2013	18426	7.88	4.59	842000
blora	2009	19567	2.91	5.08	675000
blora	2010	12180	7.17	5.19	742000
blora	2011	9916	2.26	2.59	816200
blora	2012	7919	3.55	5	855500
blora	2013	10014	7.94	4.91	932000
rembang	2009	7956	3.09	4.46	647000
rembang	2010	6289	6.61	4.45	702000
rembang	2011	7041	2.73	4.4	757600
rembang	2012	11461	4.28	4.88	816000
rembang	2013	10806	6.88	5.03	896000
pati	2009	20822	3.05	4.69	670000
pati	2010	19691	6.38	5.11	733000
pati	2011	21858	2.3	5.43	769550
pati	2012	35440	3.92	5.92	837500
pati	2013	23004	7.57	5.72	927600
kudus	2009	18979	3	3.95	750694
kudus	2010	15571	7.65	4.17	775000
kudus	2011	12640	3.34	4.21	840000
kudus	2012	7766	4.77	4.33	889000
kudus	2013	17362	8.31	4.68	990000
jepara	2009	7507	2.83	5.02	650000
jepara	2010	11021	6.24	4.52	702000
jepara	2011	13593	3.59	5.44	758000
jepara	2012	7979	4.52	5.79	800000
jepara	2013	9929	7.95	5.77	875000
demak	2009	17392	3.1	4.08	772262
demak	2010	15216	6.87	4.12	813400
demak	2011	15461	3.49	4.48	847987
demak	2012	18278	4.1	4.64	893000
demak	2013	16137	8.22	4.62	995000
semarang	2009	20274	3.18	4.37	759360
semarang	2010	19498	7.07	4.9	824000
semarang	2011	15333	3.29	5.56	880000
semarang	2012	13906	4.56	6.02	941600
semarang	2013	12348	8.11	5.62	1051000
temanggung	2009	10636	4.16	4.09	645000
temanggung	2010	8104	7.35	4.31	709500

temanggung	2011	8682	2.42	4.65	779000
temanggung	2012	7073	4.73	5.04	866000
temanggung	2013	5382	7.01	5.02	940000
kendal	2009	14476	1.23	5.55	730000
kendal	2010	12716	5.89	5.97	780000
kendal	2011	9451	3.49	5.99	843750
kendal	2012	10010	3.89	5.54	893000
kendal	2013	14542	6.9	5.24	953100
batang	2009	8431	-0.04	3.72	700000
batang	2010	7022	6.62	4.97	745000
batang	2011	3935	3.01	5.26	805000
batang	2012	7797	3.83	5.02	880000
batang	2013	4251	8.08	5.17	970000
pekalongan	2009	8824	3.39	4.3	700000
pekalongan	2010	5564	6.54	4.27	760000
pekalongan	2011	10116	2.65	4.77	810000
pekalongan	2012	5857	2.96	5.32	873000
pekalongan	2013	5920	8.18	5.45	962000
pemalang	2009	28866	4.1	4.78	630000
pemalang	2010	23924	7.38	4.94	675000
pemalang	2011	9295	2.8	4.83	725000
pemalang	2012	10005	4.04	5.28	793000
pemalang	2013	12190	6.52	5.41	908000
tegal	2009	20346	4.5	5.29	611000
tegal	2010	14243	6.44	4.83	687000
tegal	2011	19630	2.74	4.81	725000
tegal	2012	12760	4.13	5.25	795000
tegal	2013	17925	7.79	5.81	850000
brebes	2009	21104	4.25	4.99	575000
brebes	2010	19054	6.04	4.94	681000
brebes	2011	18855	3.09	4.97	717000
brebes	2012	19687	4.61	5.21	775000
brebes	2013	20897	9.83	5.06	859000
kmagelang	2009	6964	3.48	5.11	665000
kmagelang	2010	5986	6.8	6.12	745000
kmagelang	2011	3696	4.15	5.48	795000
kmagelang	2012	3042	5.13	6.48	837000
kmagelang	2013	2210	7.79	5.91	901500
ksurakarta	2009	21898	2.63	5.9	723000

ksurakarta	2010	16921	6.65	5.94	785000
ksurakarta	2011	12355	1.93	6.04	826252
ksurakarta	2012	8334	2.87	6.12	864450
ksurakarta	2013	11166	8.32	5.89	915900
ksalatiga	2009	6442	3.28	4.48	750000
ksalatiga	2010	5502	6.65	5.01	803185
ksalatiga	2011	3466	2.84	5.26	843469
ksalatiga	2012	3595	4.12	5.94	901396
ksalatiga	2013	4039	7.67	6.14	974000
ksemarang	2009	64252	3.19	5.34	838500
ksemarang	2010	49800	7.11	5.87	939756
ksemarang	2011	3684	2.87	6.41	961323
ksemarang	2012	28096	0.41	6.42	991500
ksemarang	2013	34903	8.19	6.2	1209100
kpekalongan	2009	6520	3.39	4.78	710000
kpekalongan	2010	3981	6.77	5.51	760000
kpekalongan	2011	5465	2.45	5.45	810000
kpekalongan	2012	4680	3.55	5.6	895500
kpekalongan	2013	3245	7.4	5.89	980000
ktegal	2009	10892	5.83	5.02	600000
ktegal	2010	7391	6.73	4.61	700000
ktegal	2011	3760	2.58	4.58	735000
ktegal	2012	3283	0.4	5.07	795000
ktegal	2013	4131	5.8	4.93	860000

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 2

Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratio

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	31.149436	(34,137)	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LNPGGR

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 03/27/15 Time: 22:14

Sample: 2009 2013

Periods included: 5

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 175

Use pre-specified GLS weights

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.64767	4.202274	3.485653	0.0006
INFLAS	-0.004037	0.017918	-0.225301	0.8220
PEKO	-0.089928	0.055890	-1.609024	0.1095
LNUMK	-0.342818	0.319550	-1.072813	0.2849

Weighted Statistics

R-squared	0.042152	Mean dependent var	14.49895
Adjusted R-squared	0.025347	S.D. dependent var	11.92135
S.E. of regression	0.888827	Sum squared resid	135.0924
F-statistic	2.508375	Durbin-Watson stat	0.263728
Prob(F-statistic)	0.060570		

Unweighted Statistics

R-squared	-0.087545	Mean dependent var	9.325885
Sum squared resid	68.55091	Durbin-Watson stat	0.521333

Lampiran 3

Correlated Random Effects-Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.199173	3	0.3619

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
INFLAS	0.021596	0.019667	0.000003	0.2912
PEKO	-0.031211	-0.028807	0.000225	0.8725
LNUMK	-1.436809	-1.351489	0.005177	0.2357

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LNPGGR

Method: Panel Least Squares

Date: 03/27/15 Time: 22:14

Sample: 2009 2013

Periods included: 5

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.87935	3.904150	7.397090	0.0000
INFLAS	0.021596	0.013083	1.650730	0.1011
PEKO	-0.031211	0.049780	-0.626980	0.5317
LNUMK	-1.436809	0.296388	-4.847730	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.749826	Mean dependent var	9.325885
Adjusted R-squared	0.682261	S.D. dependent var	0.601878
S.E. of regression	0.339269	Akaike info criterion	0.865432
Sum squared resid	15.76915	Schwarz criterion	1.552643

Log likelihood	-37.72534	Hannan-Quinn criter.	1.144185
F-statistic	11.09781	Durbin-Watson stat	2.269229
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4

Common Effects Model

Dependent Variable: LNPGGR

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 03/27/15 Time: 22:12

Sample: 2009 2013

Periods included: 5

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 175

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.28606	3.847921	5.531833	0.0000
INFLAS	0.001675	0.014452	0.115873	0.9079
PEKO	-6.95E-05	0.036353	-0.001911	0.9985
LNUMK	-0.877758	0.287390	-3.054236	0.0026

Weighted Statistics

R-squared	0.058535	Mean dependent var	12.75853
Adjusted R-squared	0.042018	S.D. dependent var	5.994872
S.E. of regression	0.592541	Sum squared resid	60.03896
F-statistic	3.543920	Durbin-Watson stat	0.767966
Prob(F-statistic)	0.015855		

Unweighted Statistics

R-squared	0.014319	Mean dependent var	9.325885
Sum squared resid	62.13016	Durbin-Watson stat	0.576359

Lampiran 5*Fixed Effects Model*

Dependent Variable: LNPGGR

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 03/27/15 Time: 22:13

Sample: 2009 2013

Periods included: 5

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 175

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.69596	2.369689	12.53158	0.0000
INFLAS	0.015718	0.007392	2.126469	0.0353
PEKO	-0.048000	0.032853	-1.461059	0.1463
LNUMK	-1.488464	0.183848	-8.096183	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.890287	Mean dependent var	14.49895
Adjusted R-squared	0.860657	S.D. dependent var	11.92135
S.E. of regression	0.336074	Sum squared resid	15.47359
F-statistic	30.04638	Durbin-Watson stat	2.091161
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.748641	Mean dependent var	9.325885
Sum squared resid	15.84385	Durbin-Watson stat	2.242293

Lampiran 6

Random Effects Model

Dependent Variable: LNPGGR

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/27/15 Time: 22:13

Sample: 2009 2013

Periods included: 5

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 175

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.71867	3.793535	7.306819	0.0000
INFLAS	0.019667	0.012954	1.518124	0.1308
PEKO	-0.028807	0.047471	-0.606828	0.5448
LNUMK	-1.351489	0.287522	-4.700473	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.501091	0.6857
Idiosyncratic random		0.339269	0.3143

Weighted Statistics			
R-squared	0.145606	Mean dependent var	2.702618
Adjusted R-squared	0.130617	S.D. dependent var	0.364075
S.E. of regression	0.339466	Sum squared resid	19.70559
F-statistic	9.713943	Durbin-Watson stat	1.811384
Prob(F-statistic)	0.000006		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.008450	Mean dependent var	9.325885
Sum squared resid	62.50010	Durbin-Watson stat	0.571109



Pedoman Wawancara

Analisis Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

Informan Kunci, yaitu Kepala/yang mewakili Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pengangguran terdidik ?

Jawab :

Faktor utama adalah dari niat tenaga kerjanya sendiri yang lebih memilih pekerjaan dan lebih memilih domisili tempat bekerja.

2. Kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah pengangguran terdidik ?

Jawab :

- a. Pelatihan Tenaga Kerja

Pelatihan tenaga kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Pelatihan tenaga kerja diselenggarakan oleh lembaga pemerintah (balai pelatihan tenaga kerja) dan/atau pihak swasta (lembaga pelatihan tenaga kerja).

- b. Penempatan Tenaga Kerja

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja terdiri dari dalam negeri dan luar negeri. Proses penempatan melalui program bursa tenaga kerja dan job fair.

c. Perluasan Tenaga Kerja

Perluasan tenaga kerja dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja (dilatih dalam sektor informal sesuai minat dan bakat yang kemudian didorong untuk melakukan wirausaha (pencipta kerja)).

3. Adakah koordinasi antara pihak Disnaker Provinsi Jawa Tengah dengan BAPPEDA dalam penyelesaian masalah pengangguran terdidik ?

Jawab :

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menangani masalah pengangguran terdidik, terdapat proses usulan anggaran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kemudian di bahas oleh DPR untuk dimasukkan pada APBD.

4. Apakah yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyiasati keadaan pada saat tingkat inflasi yang tinggi dan berdampak pada jumlah pengangguran yang tinggi ?

Jawab :

Ikut berperan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan laju inflasi.



Pedoman Wawancara

Analisis Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

Informan Kunci, yaitu Kepala/yang mewakili Bidang Perekonomian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah pengangguran terdidik ?

Jawab :

- a. Meningkatkan anggaran untuk alokasi perbaikan infrastruktur dalam rangka menarik minat investor yang bertujuan untuk meningkatkan investasi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat mendorong perekonomian yang berdampak pada perluasan tenaga kerja.
- b. Menciptakan iklim kondusif untuk investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- c. Menciptakan hubungan industrial antara pekerja/buruh, perusahaan dan pemerintah daerah supaya tidak terjadi PHK atau konflik ketenagakerjaan.

2. Koordinasi kebijakan seperti apa yang dilakukan oleh pihak BAPEDA Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah ?

Jawab :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah mendorong dan mendukung kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD maupun RKPD) yang direncanakan oleh

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah meliputi :

4. Meningkatkan keterampilan bagi calon tenaga kerja yang sesuai dengan dunia usaha/pasar kerja melalui pelatihan di Badan Latihan Kerja (BLK).
 5. Meningkatkan keharmonisan hubungan industrial antara pekerja/buruh, perusahaan dan pemerintah agar tidak terjadi PHK atau konflik ketenagakerjaan.
 6. Mendorong peluang informasi lapangan kerja melalui kegiatan *job market fair*, bursa kerja khusus dll.
3. Apakah yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyasati keadaan pada saat tingkat inflasi yang tinggi dan berdampak pada jumlah pengangguran yang tinggi ?

Jawab :

- a. Meningkatkan distribusi barang-barang komoditas pokok masyarakat,
- b. Menjamin ketersediaan barang-barang pokok masyarakat secara mencukupi,
- c. Meningkatkan peran dan fungsi tim pengendali inflasi daerah (TPID),
- d. Dalam kondisi tertentu dilakukan operasi pasar terhadap barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.